

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung UMKM bagi Kemandirian Perempuan di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi

Amelia Putri Utami¹, Belia Ismiarefa², Nela Dwi Amelia³, Rafly Arya Pratama⁴, Ahmad Rifki⁵

Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Kota Jambi, Indonesia^{1,2,3,4}

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jambi, Kota Jambi, Indonesia⁵

*Email Korespondensi: ameliaaaputrii570@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 27-11-2025
Disetujui 07-12-2025
Diterbitkan 09-12-2025

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of local government policies in empowering micro, small, and medium enterprises for women's independence in Purwodadi Village, Tebing Tinggi District and to determine the efforts of micro, small, and medium enterprises, especially women, in creating business opportunities in Purwodadi Village, Tebing Tinggi District. In the context of a continuously developing economy, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting local economic growth. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection through in-depth interviews and literature studies. The theoretical concept used in this study is the theory of empowerment, which refers to the process of increasing the power of individuals and communities to control resources, influence decisions, and overcome challenges. The methodology used to complete this research is descriptive research with qualitative research methods. The research results show that the local government in Purwodadi Village provides support to women-owned MSMEs through licensing facilitation, training, access to capital such as the People's Business Credit (KUR), and the provision of marketing facilities. This support helps improve production quality, expand markets, and strengthen business management capabilities. MSMEs benefit, although further training and increased digital literacy are still needed to cope with modern economic developments. In conclusion, local government policies have been quite effective in supporting the sustainability of women-owned MSMEs and encouraging economic independence. However, strengthening digital marketing, product innovation, and business facilities is still needed for MSMEs to develop optimally. These findings emphasize the importance of sustainable and adaptive policies to build a more competitive women-owned MSMEs ecosystem.

Keywords: Regional Government Policy, MSMEs, Women's Independence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk kemandirian Perempuan di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing tinggi serta untuk mengetahui upaya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah khusus nya Perempuan dalam menciptakan peluang usaha di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing tinggi. Dalam konteks perekonomian yang terus berkembang, Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi local. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan studi literatur. Konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan, yang mengacu pada proses peningkatan kekuatan individu dan komunitas untuk mengendalikan sumber daya, memengaruhi keputusan, dan mengatasi tantangan. Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Desa Purwodadi memberikan dukungan kepada UMKM perempuan melalui fasilitasi perizinan, pelatihan, akses permodalan seperti KUR, serta penyediaan fasilitas pemasaran. Dukungan ini membantu peningkatan kualitas produksi, perluasan pasar, dan penguatan kemampuan pengelolaan usaha. Pelaku UMKM merasakan manfaatnya, meskipun masih diperlukan pelatihan lanjutan dan peningkatan literasi digital untuk menghadapi perkembangan ekonomi modern. Kesimpulannya, kebijakan pemerintah daerah telah cukup efektif mendukung keberlanjutan UMKM perempuan dan mendorong kemandirian ekonomi. Namun, penguatan pemasaran digital, inovasi produk, dan fasilitas usaha masih dibutuhkan agar UMKM dapat berkembang optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif untuk membangun ekosistem UMKM perempuan yang lebih berdaya saing.

Katakunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, UMKM, Kemandirian Perempuan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Amelia Putri Utami, Belia Ismiarefa, Nela Dwi Amelia, Rafly Arya Pratama, & Ahmad Rifki. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung UMKM bagi Kemandirian Perempuan di Desa Porwodadi Kecamatan Tebing Tinggi. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 227-236. <https://doi.org/10.63822/hfbyfg93>

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi perempuan di pedesaan yang ingin meningkatkan pendapatan keluarga dan mencapai kemandirian ekonomi. Di Desa Purwodadi Tebing Tinggi, peran UMKM semakin penting karena menjadi wadah pemberdayaan perempuan dalam mengelola usahanya sendiri. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk fasilitasi permodalan, pelatihan, pendampingan, dan pembukaan akses usaha, menjadi faktor kunci dalam memperkuat kesejahteraan ekonomi perempuan di desa Purba, E. P. (2024). Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas program dan kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan di lapangan. Literatur menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh formulasinya, tetapi terutama oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lokal.

Pemerintah daerah berperan krusial dalam mendukung keberlanjutan UMKM milik perempuan melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penyediaan akses pembiayaan terjangkau seperti KUR, UMi, dan PNM Mekaar, hingga program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup manajemen usaha, keterampilan teknis, kepemimpinan, dan pemasaran digital. Lebih lanjut, pemerintah memperluas fasilitasi pemasaran dan akses pasar melalui pameran, dan bazar. Upaya penguatan kelembagaan, seperti dukungan bagi koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), telah membantu meningkatkan daya saing wirausaha perempuan. Sesuai dengan RENSTRA Tahun 2016-2021 Pemerintah juga telah menerapkan penyederhanaan perizinan untuk memudahkan perempuan memulai atau mengembangkan usaha, dan dalam kondisi tertentu, memberikan bantuan langsung seperti Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PMU) untuk memastikan keberlanjutan usaha. Semua kebijakan ini saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi pemberdayaan UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasarkan dalam negeri. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah (Arifin, 2025).

UMKM adalah bisnis atau usaha kreatif yang memenuhi standar usaha yang hadir sebagai mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ramadhan, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008), pengertian mengenai Usaha Kecil diartikan sebagai aktivitas yang memberikan keuntungan (profit) juga ekonomi kreatif yang mandiri. Adapun, pemilik dan pelaksana usaha berasal dari perseorangan atau badan usaha yang tidak bergantung pada unit usaha lain, tidak terikat pada pengusaha besar maupun menengah serta bukan cabang-cabang bagiannya.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, konsep yang telah dikemukakan, ada 4 indikator pemberdayaan, yaitu: (1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan. (2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut. (3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut. (4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara (Rahayu, 2015).

Dengan penjelasan di atas maka keahlian yang ada dalam dalam aspek tersebut sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk yang dijual oleh sebuah UKM dan bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas jangkauan pasar dan menembus pasar baru untuk UKM yang lebih maju. Melihat berbagai perubahan, kebutuhan, serta dukungan yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku UMKM perempuan di Desa Purwodadi, muncul pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dijalankan di tingkat desa, tantangan apa saja yang masih dihadapi pelaku UMKM perempuan dalam mengembangkan usahanya, sejauh mana peluang usaha dapat diciptakan melalui fasilitasi perizinan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran, serta strategi apa yang diperlukan agar UMKM perempuan di Desa Purwodadi dapat mencapai kemandirian ekonomi dan berkembang secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Tinjauan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Dengan demikian, suatu penelitian harus dapat menghasilkan kajian yang bersifat objektif, sistematis dan logis. Untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan, penulis harus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sesuai dengan judul penelitian serta rumusan masalah penelitian, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung UMKM bagi Kemandirian Perempuan di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi".

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai informan, termasuk perangkat desa, pelaku umkm dan literatur pendukung. Tahapan penelitian dimulai dengan perencanaan, yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan penelitian, dan penyusunan instrumen seperti pedoman wawancara. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, di mana wawancara mendalam dilakukan dengan perangkat desa dan pelaku umkm untuk memahami lebih lanjut implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif melalui 3 tahapan, antara lain reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam deskripsi sistematis yang dirancang untuk menjawab tujuan penelitian. Validitas hasil penelitian diperkuat melalui data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal dan sumber ilmiah yang relevan terkait kebijakan pemerintah daerah dan UMKM dan juga mengkonfirmasi temuan dengan informan untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan mewakili situasi sebenarnya.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam semi-terstruktur. Subjek penelitian terdiri dari 2 (dua) orang informan, yaitu pelaku UMKM (seperti yang diwakili oleh narasumber wanita yang membahas antusiasme pemerintah desa dalam fasilitasi izin halal, pelatihan pengolahan makanan, akses KUR, dan pemasaran melalui wadah UMKM). dan perangkat desa (yang dapat diinferensikan dari konteks dukungan administratif dan fasilitasi oleh pemerintahan desa, dinas terkait seperti OSS dan Dinas Kesehatan, serta program jemput bola untuk perizinan). Pemilihan subjek dilakukan melalui purposive sampling untuk memastikan representasi dari perspektif praktis pelaku usaha dan administratif pemerintah desa, dengan tujuan mendapatkan wawasan komprehensif tentang peran pemerintah dalam pengembangan UMKM tanpa mengubah makna asli dari materi wawancara yang menekankan dampak positif dukungan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan kemandirian perempuan di Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan pelaku UMKM. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait kebijakan pemerintah daerah, UMKM, serta bentuk dukungan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam mendorong kemandirian ekonomi UMKM perempuan di Desa Purwodadi. Hasil wawancara kemudian disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan dalam melihat ringkasan pertanyaan dan jawaban, serta kesimpulan atau temuan yang dapat ditarik dari setiap poin pembahasan. Berikut adalah hasil wawancara dengan perangkat desa dan pelaku umkm.

Tabel 1. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban Perangkat Daerah	Keterangan/Temuan
1.	Bagaimana bentuk dukungan administratif dari pemerintah Desa Purwodadi dalam membantu UMKM perempuan mengurus perizinan usaha?	Kami melakukan pendataan dan verifikasi UMKM sebagai dasar pengajuan OSS, serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan untuk mempercepat pengurusan PIRT, sanitasi, dan izin lainnya.	Pemerintah desa menjadi fasilitator administrasi melalui pendataan, verifikasi, dan koordinasi lintas dinas, sehingga proses perizinan UMKM terutama bagi Perempuan menjadi lebih mudah dan cepat.

Tabel 2. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban Pelaku UMKM	Keterangan/Temuan
1.	Apakah pemerintah daerah memfasilitasi UMKM dalam hal perizinan usaha atau sertifikat produk (halal/SNI)?	Ya, pemerintah desa sangat berperan dan selalu memfasilitasi perizinan halal. Kami juga dibantu melalui OSS dan Dinas Kesehatan untuk mengurus PIRT, izin mikro, NIB/NIP, serta perizinan lain yang terkait perlindungan halal.	Pemerintah desa cukup aktif memfasilitasi perizinan UMKM. Ada dukungan lintas instansi (OSS, Dinas Kesehatan). Bantuan mencakup halal, PIRT, izin mikro, NIB, NIP ini menunjukkan dukungan administratif kuat dan akses perizinan terpadu.
2.	Apakah ada bentuk dukungan dari pemerintah	Sangat-sangat ada dukungan dari pemerintahan. Banyak	Pemerintah menyediakan dukungan

	kepada UMKM di desa ini (pelatihan, modal, pemasaran, fasilitas)?	permodalan seperti melalui KUR atau dana hibah seperti di Misake. Pelatihan sering diadakan baik tingkat kabupaten maupun provinsi, seperti pelatihan ketahanan pangan dan penggunaan bahan kimia pada makanan/minuman. Pemasaran juga dibantu lewat MN Market, toko-toko dan fasilitasi penyaluran jajanan.	komprehensif: permodalan (KUR, hibah), pelatihan rutin, pemasaran (MN Market), serta fasilitas penyaluran produk. Ini menunjukkan pendampingan berkelanjutan dan peran aktif pemerintah dalam peningkatan kapasitas UMKM.
3.	Apa saran/harapan kepada pemerintah agar dukungan UMKM lebih efektif ke depan?	Saran saya, pemerintah lebih memberikan wadah seperti ruko atau depot rumah UMKM. Karena pelaku UMKM banyak, maka dibuatkan wadah untuk menampung dan memperkenalkan produk agar lebih dikenal daerah lain."	Harapan besar pelaku UMKM adalah penyediaan fasilitas fisik permanen, seperti Rumah UMKM / ruko bersama. Ini menunjukkan kebutuhan akan sentra pemasaran, identitas usaha, dan tempat display produk yang terorganisir.

Desa purwodadi memiliki Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang beraneka-ragam mulai dari usaha pakaian, bouqet bunga, makanan dan minuman serta usaha batik yang pemiliknya rata-rata adalah seorang perempuan. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM perempuan di Desa Purwadadi, Kecamatan Tebing Tinggi, yang memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah berperan dalam mendukung legalitas usaha, penguatan kapasitas, permodalan, pemasaran, serta penyediaan fasilitas bagi pelaku UMKM. Temuan ini disajikan dalam bentuk naratif deskriptif sebagai representasi kondisi di lapangan tanpa menampilkan data mentah, tetapi memfokuskan pada pola, pengalaman, dan bentuk dukungan nyata yang dirasakan informan sebagai perwakilan pelaku UMKM desa. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan yang cukup beragam, namun dalam beberapa aspek masih diperlukan penguatan dan kesinambungan agar UMKM perempuan dapat berkembang lebih optimal.

1. Fasilitasi Perizinan Usaha Dan Dertifikasi Produk

Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa, peran pemerintah daerah menjadi krusial, terutama dalam memfasilitasi proses perizinan usaha, sertifikat produk, sertifikat halal, serta Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan wawancara dengan informan, pemerintah desa menunjukkan antusiasme tinggi dan keterlibatan aktif dalam mendukung pelaku UMKM. Informan menyatakan, "Ya, pemerintahan desa sangat berantusias dan sangat berperan dalam UMKM di desa. sehingga kami para pelaku UMKM selalu difasilitasi untuk membuat perizinan halal."

Dukungan ini tidak terbatas pada sertifikat halal saja, melainkan mencakup berbagai jenis perizinan dari dinas terkait. Informan menjelaskan lebih lanjut, "Selain halal, kami juga dari Dinas OSS dan dari Dinas Kesehatan, yaitu berupa sertifikat PIRT, terus OSN, yang satu atap itu, ijin mikro, nomor ijin perusahaan, yang baru-baru ini sedang digalakkan atau difasilitasi dalam perlindungan halal." Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui dinas-dinas seperti Dinas Operasional Satu Pintu (OSS) dan Dinas Kesehatan menyediakan akses mudah untuk mendapatkan sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), izin usaha mikro, dan nomor izin perusahaan, yang semuanya terintegrasi dalam program perlindungan halal.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menegaskan bahwa pemerintah desa, dinas terkait, serta lembaga pelayanan terpadu OSS berperan aktif dalam membantu pelaku UMKM mengurus berbagai bentuk perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara formal. Ia mengatakan, "Pelaku UMKM tidak perlu mengurus izin sendiri, melainkan difasilitasi melalui pendampingan langsung maupun melalui agenda jemput bola." Proses pengurusan sertifikat halal, PIRT, izin usaha mikro, hingga nomor izin perusahaan difasilitasi melalui program-program yang disediakan pemerintah, sehingga pelaku UMKM tidak perlu menangani administrasi secara mandiri.

Kehadiran layanan satu pintu ini dirasakan sangat membantu, terutama bagi pelaku usaha perempuan yang sebelumnya belum memahami proses administrasi usaha. Informan menekankan bahwa antusiasme pemerintah membuat proses lebih mudah dan dapat diakses oleh masyarakat desa. Pemerintah desa menunjukkan komitmen tinggi terhadap kemajuan UMKM, sehingga penerbitan izin halal pun dilakukan secara berkala melalui program perlindungan halal. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menyediakan kebijakan formal, tetapi benar-benar memastikan implementasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa, sehingga mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Dukungan Dari Pemerintah Kepada Umkm Di Desa ini Seperti,

Dalam konteks pemberdayaan UMKM di Desa Purwadadi, dukungan pemerintah melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan usaha telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha, khususnya perempuan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaku UMKM sering mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi, dengan materi relevan seperti ketahanan pangan, pengolahan produk makanan dan minuman, serta penggunaan bahan kimia yang aman. Pelatihan ini disampaikan oleh dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang membantu meningkatkan kualitas produksi, memperluas wawasan, dan memperbaiki cara kerja pelaku usaha agar sesuai dengan standar modern. Informan mengonfirmasi bahwa dukungan ini sangat bermanfaat, karena sebelumnya mereka hanya mengandalkan pengalaman pribadi. Selain pelatihan, penyuluhan dan pendampingan usaha juga diintegrasikan, seperti dalam program pembiayaan yang diikuti dengan bimbingan agar dana dikelola tepat, serta fasilitasi pemasaran melalui MN Market dan depot bersama yang memberikan wadah bagi produk UMKM agar lebih dikenal di daerah lain. Hal ini menciptakan citra profesional dan mendorong pengembangan usaha yang lebih kompetitif, dengan harapan pemerintah meningkatkan variasi pelatihan lanjutan dan promosi untuk mendukung ekonomi lokal.

3. Akses Permodalan

Akses pemodal menjadi salah satu pilar utama dukungan pemerintah bagi UMKM, yang membantu mengatasi hambatan modal terutama bagi pelaku usaha perempuan yang sering kali kesulitan mendapatkan jaminan bank. Informan menceritakan bahwa pemerintah menyediakan berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, dana hibah melalui Mekaar, dan bantuan lain yang dapat diajukan tanpa jaminan, memungkinkan UMKM bertahan dan berkembang pasca pandemi.

Dukungan ini tidak hanya berupa modal, tetapi juga diikuti penyuluhan dan pendampingan untuk pengelolaan dana yang efektif, sehingga pelaku usaha dapat mengoptimalkan penggunaannya. Informan menyoroti bahwa program ini sangat bermanfaat, seperti yang diungkapkan: "karena di sini UMKM banyak yang diusahakan yaitu permodalan baik melalui perkreditan yaitu KUR atau bantuan dana hibah seperti di Misake." Secara keseluruhan, akses pemodal ini memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan UMKM, mendorong pembaca untuk mempertimbangkan penguatan dukungan lebih lanjut, termasuk pengembangan digital, guna menghadapi pasar kompetitif.

4. Fasilitasi Pemasaran Dan Penguatan Jaringan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara fasilitas, pemasaran dan penguatan jaringan pasar merupakan salah satu bentuk dukungan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM. Informan menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyediakan berbagai media pemasaran yang dapat diakses oleh pelaku usaha, seperti MN Market, toko-toko lokal, dan ruang usaha yang disediakan khusus bagi pelaku UMKM. Salah satu bentuk dukungan yang menurut informan sangat membantu adalah pendirian Rumah UMKM atau depot bersama yang berfungsi sebagai tempat promosi, penjualan, dan koordinasi pelaku UMKM di Desa Purwadadi. Fasilitas ini memungkinkan produk-produk UMKM desa dikenal lebih luas dan menjangkau konsumen dari luar daerah. Keberadaan wadah pemasaran ini tidak hanya memudahkan pelaku UMKM mempromosikan produk, tetapi juga meningkatkan citra profesionalisme dan kualitas produk lokal. Informan mengungkapkan bahwa dengan adanya wadah seperti Rumah UMKM, pelaku usaha dapat bekerja lebih terstruktur dan memiliki tempat khusus untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat.

Dari wawancara juga ditemukan bahwa pelaku UMKM memberikan penilaian positif terhadap keterlibatan pemerintah daerah, namun tetap memiliki harapan agar dukungan pemerintah ke depan dapat ditingkatkan, terutama dalam hal perluasan fasilitas, peningkatan promosi, serta pemberian pelatihan lanjutan yang lebih variatif. Informan menyampaikan bahwa meskipun pelatihan sudah sering dilakukan, namun perkembangan usaha membutuhkan pengembangan kompetensi yang lebih modern, terutama di bidang pemasaran digital, inovasi produk, dan strategi penjualan berbasis teknologi. Harapan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pengembangan diri dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM perempuan cukup kuat dan dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha, mulai dari aspek legalitas, pelatihan, pembiayaan, pemasaran, hingga fasilitas fisik. Dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Desa Purwadadi merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah daerah, namun tetap membutuhkan dukungan lanjutan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Pada akhirnya, hasil penelitian ini menggambarkan hubungan yang cukup harmonis antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah, namun tetap terdapat ruang perbaikan untuk mengoptimalkan keberlangsungan UMKM perempuan sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi lokal desa.

Pembahasan

Desa Purwadadi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program yang mendukung keberlanjutan UMKM perempuan melalui serangkaian kebijakan yang terstruktur. Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan temuan tersebut melalui kerangka teori pemberdayaan, teori implementasi kebijakan publik, serta pendekatan pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya sekadar menjelaskan hasil, tetapi juga memaknai bagaimana kebijakan pemerintah

daerah berdampak terhadap kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM, termasuk implikasi untuk pengembangan kebijakan di masa depan.

Temuan mengenai fasilitasi perizinan oleh pemerintah daerah dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Siregar, 2022) yang menekankan tiga aspek utama: karakteristik masalah, desain kebijakan, dan kondisi implementasi. Pemberian kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal, PIRT, dan perizinan berbasis OSS mencerminkan bahwa pemerintah berhasil mengurangi hambatan regulatif yang biasanya membebani pelaku UMKM. Dalam konteks UMKM perempuan, legalitas usaha tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pemasaran, serta membuka peluang kemitraan. Peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses perizinan menunjukkan adanya kesesuaian antara desain kebijakan yang pro-UMKM dan implementasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bersifat *bottom-up* dalam arti mendengarkan kebutuhan pelaku UMKM secara langsung. Dalam perspektif pemberdayaan, kemudahan administrasi merupakan langkah awal penting yang membantu perempuan keluar dari keterbatasan struktural yang selama ini membatasi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi.

Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM perempuan dapat diinterpretasikan melalui teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Zimmerman dan Perkis (dikutip Safitri, W. P. F., & Purwanto, 2025). Teori tersebut menekankan bahwa pemberdayaan terdiri dari peningkatan kontrol individu terhadap kehidupannya, peningkatan kompetensi, serta meningkatnya kemampuan mengambil keputusan ekonomi. Pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah daerah baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi mencakup keterampilan teknis seperti ketahanan pangan, penggunaan bahan-bahan kimia makanan yang aman, serta manajemen usaha. Pelatihan semacam ini bukan hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga meningkatkan kapabilitas perempuan dalam memahami dinamika usaha, mengelola risiko, dan mengambil keputusan strategis.

Selanjutnya, dukungan permodalan melalui KUR dan bantuan hibah menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah berperan dalam mengatasi hambatan struktural berupa keterbatasan akses modal. Ketika pemerintah daerah mempermudah akses terhadap KUR, memberikan pendampingan, serta menyediakan bantuan hibah, hal tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan peluang ekonomi bagi perempuan yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal.

Dukungan pemerintah dalam fasilitasi pemasaran berperan penting dalam penguatan ekonomi lokal. Penyediaan MN Market, dan toko lokal, menciptakan ekosistem pemasaran yang terstruktur bagi pelaku UMKM perempuan. Digitalisasi pemasaran juga membuka peluang pasar online, meski literasi digital di desa masih perlu ditingkatkan. Dari perspektif gender, dukungan pemerintah terhadap UMKM perempuan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian fasilitas ekonomi.

Selain memaknai keberhasilan kebijakan, pembahasan juga perlu mengidentifikasi aspek yang masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang. Informan menyampaikan harapan agar dukungan pemerintah dapat lebih diperbesar dan difokuskan, terutama dalam pemantapan pemasaran, peningkatan pelatihan yang lebih variatif, serta perluasan fasilitas fisik bagi UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program pemerintah sudah berjalan cukup baik, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan UMKM perempuan di Desa Purwadadi sudah berjalan cukup efektif dan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas, legalitas, dan pemasaran UMKM. Jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan dan implementasi kebijakan, maka program-program yang ada dapat

dianggap tepat sasaran karena mencakup tiga aspek penting: peningkatan akses sumber daya, peningkatan kemampuan pelaku usaha, dan penyediaan peluang pasar. Namun demikian, masih terdapat peluang untuk memperkuat efektivitas kebijakan dengan mengembangkan strategi yang lebih inovatif, memperluas pasar digital, dan meningkatkan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang, khususnya dalam menciptakan ekosistem UMKM yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan perempuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berperan penting dalam mendukung UMKM perempuan di Desa Purwodadi melalui fasilitasi perizinan, pelatihan, akses permodalan, dan penyediaan sarana pemasaran. Dukungan ini membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan usaha, legalitas produk, serta memperluas pasar sehingga mendorong kemandirian ekonomi perempuan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa dukungan yang telah diberikan masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek pemasaran digital, variasi pelatihan lanjutan, serta perluasan fasilitas usaha yang lebih memadai. Pelaku UMKM perempuan mengharapkan kebijakan pemerintah ke depan lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern, termasuk pemanfaatan teknologi dalam strategi pengembangan usaha. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap kemandirian perempuan dalam mengembangkan UMKM, serta memberikan prospek pengembangan kebijakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem UMKM di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2025). Pemberdaya usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan digitalisasi pemasaran produk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 oleh pemerintah daerah kota tasikmalaya. *Jurnal prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1.
- Awaludin, A. (2025). Persepsi Umkm Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha. *Applied Economics and Business Global*, 1(1), 8–15.
- Purba, E. P. (2024). (2024). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah untuk kemandirian perempuan di desa cinta rakyat kecamatan percut sei tuan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09.
- Rahayu, P. P. (2015). Program pemberdayaan perempuan dan motivasi berwirausaha wanita tani. *E-Journal UNESA. Volume Nomor Tahun 2016, 0 - 216*, 1–9.
- Ramadhan, W. (2023). Pengaturan hukum usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan keadilan ekonomi. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.
- Safitri, W. P. F., & Purwanto, D. (2025). Community Empowerment through the Sangiran Ancient Straw Festival in Krikilan Village Based on Rappaport ' s Empowerment Theory Pemberdayaan Masyarakat Melalui Festival Jerami Purba Sangiran Desa Krikilan Ditinjau Dari Teori Pemberdayaan Rappaport Pendahu. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 13(1), 1–11.
- Siregar, N. (2022). Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.